Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 24342-24348

Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2025: Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Erina Gayatri[1], Salma Muhimatul Izza[2], Eva Hany Fanida[3], Revienda Anita Fitrie[4]

[1,2,3,4]Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Corresponding author e-mail: 25040674073@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674080@mhs.unesa.ac.id[2], evafanida@unesa.ac.id[3], reviendafitrie@unesa.ac.id[4]

Published: Mei, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the structure and performance of regional revenue in Bojonegoro Regency during 2024–2025, focusing on the contribution of Local Own-Source Revenue (PAD) and transfer revenue to regional financial performance. The study is motivated by the importance of regional fiscal independence in the decentralization era, where the ability of local governments to generate their own revenue serves as a key indicator of successful regional autonomy. This research employs a quantitative approach with descriptive and explanatory designs. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), as well as relevant scientific publications and online media. Data analysis techniques include descriptive, comparative, and simple correlational analysis. The results indicate that the realization of regional revenue in Bojonegoro Regency in 2025 increased significantly and exceeded the predetermined target. However, the revenue structure is still dominated by transfer funds, particularly oil and gas revenue-sharing funds, indicating that fiscal independence has not yet been fully achieved. Although PAD shows an increasing trend, its contribution to total regional revenue remains relatively smaller compared to transfer revenue. Therefore, strategies to optimize PAD and diversify revenue sources are necessary to enhance fiscal independence and ensure sustainable regional financial performance.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Transfer Revenue, Regional Financial Performance, Fiscal Independence, Regional Budget (APBD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024–2025 dengan fokus pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam era desentralisasi, di mana kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta publikasi ilmiah dan media daring. Teknik analisis meliputi analisis deskriptif, komparatif, dan korelasional sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan melampaui target yang ditetapkan. Namun, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, khususnya dana bagi hasil migas, sehingga tingkat kemandirian fiskal belum optimal. PAD menunjukkan tren peningkatan, tetapi kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif lebih kecil dibandingkan dana transfer. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi PAD dan diversifikasi sumber pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian Fiskal, APBD

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di era otonomi. Dalam konteks keuangan publik, pendapatan daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. Menurut Halim (2012), struktur pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, di mana tingkat kemandirian fiskal sangat ditentukan oleh besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Mahmudi (2010) juga menegaskan bahwa kemampuan daerah menggali sumber pendapatan sendiri menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik fiskal unik karena didukung oleh sektor migas melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan data Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2025, struktur perekonomian Bojonegoro masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian, selain pertanian dan perdagangan (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2025). Pada tahun 2025, realisasi pendapatan daerah Bojonegoro mencapai Rp 6,4 triliun atau 109 persen dari target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja fiskal yang relatif baik (Javasatu.com, 2025). Namun demikian, berita lain mencatat bahwa hingga April 2025 realisasi PAD baru mencapai sekitar 38 persen dari target Rp 1 triliun, yang menunjukkan adanya dinamika dalam pencapaian target pendapatan daerah (Radar Bojonegoro, 2025).

Kontribusi DBH migas juga menjadi komponen signifikan dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima sekitar Rp 1,94 triliun dari Dana Bagi Hasil migas, yang memperkuat posisi fiskal daerah namun sekaligus menunjukkan ketergantungan pada transfer pusat (Suarabojonegoro.com, 2025). Data dari Portal Data APBD DJPK Kementerian Keuangan (2026) menunjukkan bahwa secara nasional, sebagian besar pemerintah daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dibandingkan PAD, sehingga isu kemandirian fiskal tetap menjadi tantangan utama.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024; 2025), tren penerimaan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan peningkatan nominal pendapatan pada periode 2023–2025, namun proporsi PAD terhadap total pendapatan di banyak daerah masih relatif terbatas dibanding dana transfer. Hal ini sejalan dengan temuan Mundiroh (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sehingga komposisi pendapatan menjadi krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Dalam konteks akademik, Aziz (2024) menegaskan bahwa tren unsur PAD Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya peningkatan pada komponen pajak daerah dan retribusi, meskipun fluktuasi tetap terjadi akibat faktor ekonomi dan kebijakan fiskal. Silviana (2025) juga menemukan bahwa determinasi PAD di Bojonegoro dipengaruhi oleh optimalisasi pajak daerah dan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal. Sementara itu, penelitian Maesyaroh, Samanto, dan Ma'ruf (2022) serta Siregar et al. (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Kamala et al. (2025) menekankan pentingnya strategi optimalisasi PAD melalui inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik guna memperkuat kemandirian fiskal. Putri et al. (2022) juga menyatakan bahwa hubungan antara PAD dan APBD sangat erat dalam menentukan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Di sisi lain, Rizkiyah dan Anitasari (2023) menyoroti bahwa dana perimbangan tetap berperan dalam mendorong pembangunan manusia di daerah, sehingga keseimbangan antara PAD dan transfer pusat menjadi isu strategis.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kinerja pendapatan yang tinggi secara nominal pada tahun 2025, tantangan struktural berupa ketergantungan pada dana transfer dan optimalisasi PAD tetap menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan publik daerah (Aziz, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap struktur dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal serta efektivitas kebijakan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori untuk menganalisis struktur serta kinerja pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pendekatan eksplanatori bertujuan menjelaskan hubungan antarvariabel keuangan daerah terhadap kinerja fiskal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, jurnal ilmiah, serta berita daring yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah laporan statistik, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif untuk melihat tren pendapatan, analisis komparatif untuk membandingkan target dan realisasi anggaran, serta analisis korelasional sederhana guna mengidentifikasi keterkaitan antara PAD, dana perimbangan, dan total pendapatan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren dan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Pendapatan daerah merupakan indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dihimpun dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), struktur pendapatan Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, khususnya pada tahun 2025. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 bahkan dilaporkan mencapai Rp6,4 triliun atau 109 persen dari target yang ditetapkan (Javasatu.com, 2025).

Menurut konsep akuntansi sektor publik, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2012). PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Aziz (2024) menyatakan bahwa tren unsur PAD di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan fluktuasi, namun secara umum mengalami peningkatan seiring optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Komponen Pendapatan	Realisasi (Rp)
Total Pendapatan Daerah	6,4 Triliun
Dana Bagi Hasil Migas	1,94 Triliun
Target PAD 2025	1 Triliun

Sumber: Javasatu.com (2025); Suarabojonegoro.com (2025); Radar Bojonegoro (2025).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kontribusi dana bagi hasil migas sebesar Rp1,94 triliun memiliki peranan signifikan dalam struktur pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Bojonegoro masih sangat bergantung pada sektor migas sebagai sumber penerimaan utama. Menurut Mahmudi (2010), ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dapat memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Selain besarnya kontribusi dana bagi hasil migas, struktur pendapatan tersebut juga mengindikasikan adanya risiko fiskal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Ketergantungan pada sektor migas membuat pendapatan daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah pusat terkait pembagian hasil sumber daya alam. Apabila terjadi penurunan harga komoditas atau perubahan regulasi, maka kapasitas fiskal daerah dapat mengalami tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi mitigasi risiko melalui perencanaan anggaran yang lebih konservatif dan pembentukan cadangan fiskal. Di sisi lain, peningkatan kualitas belanja daerah juga menjadi penting agar dana yang besar dari sektor

migas benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan PAD menjadi langkah strategis untuk menciptakan struktur keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Perkembangan dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menjadi indikator utama kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Data menunjukkan bahwa target PAD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 sebesar Rp1 triliun, namun hingga April 2025 realisasinya masih kurang 62 persen dari target tersebut (Radar Bojonegoro, 2025).

Temuan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD, meskipun total pendapatan daerah secara keseluruhan melampaui target. Kamala et al. (2025) menjelaskan bahwa optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan pengawasan.

Hasil penelitian Silviana (2025) juga menunjukkan bahwa determinasi PAD di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh variabel pajak daerah dan aktivitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Maesyaroh, Samanto, dan Ma'ruf (2022) yang menemukan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD.

Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2025

Keterangan	Nilai
Target PAD 2025	Rp1 Triliun
Realisasi s.d. April 2025	Kurang 62% dari target

Sumber: Radar Bojonegoro (2025).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian PAD belum optimal pada awal tahun anggaran. Namun, peningkatan realisasi pada semester berikutnya berpotensi terjadi apabila strategi optimalisasi diterapkan secara efektif.

Menurut Halim (2012), PAD yang kuat mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus menjadi prioritas dalam perencanaan fiskal jangka panjang. Selain itu, dinamika capaian PAD pada awal tahun anggaran juga dapat dipengaruhi oleh pola penerimaan pajak dan retribusi yang bersifat musiman, di mana beberapa jenis pajak daerah cenderung terealisasi lebih besar pada semester kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja PAD tidak dapat hanya didasarkan pada capaian triwulanan, tetapi perlu dilihat secara kumulatif hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat serta memperkuat basis data wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas pemungutan. Dengan perencanaan yang berbasis data dan strategi yang terintegrasi, peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan.

Peran Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Migas

Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Pada tahun 2025, pemerintah daerah menerima dana bagi hasil (DBH) migas sebesar Rp1,94 triliun (Suarabojonegoro.com, 2025).

Dana perimbangan, termasuk DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan komponen utama pendapatan transfer dari pusat ke daerah. Menurut Mundiroh (2019), dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Artinya, semakin besar dana transfer yang diterima, semakin besar pula peluang peningkatan belanja pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Rizkiyah dan Anitasari (2023) juga menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pusat tidak hanya berdampak pada struktur APBD, tetapi juga pada kualitas

pembangunan manusia. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap DBH migas memiliki risiko fiskal apabila terjadi fluktuasi harga minyak dunia. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

Analisis Kinerja Fiskal dan Kemandirian Daerah

Berdasarkan data BPS (2024; 2025), struktur penerimaan pemerintah daerah di Indonesia secara umum masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Pola ini juga terlihat pada Kabupaten Bojonegoro, di mana kontribusi DBH migas sangat signifikan dibandingkan PAD.

Putri et al. (2022) menyatakan bahwa hubungan antara PAD dan APBD menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Dalam konteks Bojonegoro, meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan, kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif lebih kecil dibandingkan dana transfer.

Siregar et al. (2024) menyebutkan bahwa peningkatan PAD dan pajak daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada kemandirian fiskal, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,4 triliun pada tahun 2025 (Javasatu.com, 2025), Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang cukup besar. Namun, struktur pendapatan menunjukkan perlunya penguatan basis pajak daerah dan optimalisasi potensi ekonomi non-migas.

Implikasi Kebijakan dan Strategi Optimalisasi PAD

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk memperkuat kinerja fiskal Kabupaten Bojonegoro. Pertama, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meminimalkan kebocoran penerimaan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, diperlukan diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pariwisata, serta peningkatan iklim investasi daerah. Strategi ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil migas dan memperluas basis ekonomi lokal. Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Aziz (2024) menegaskan bahwa tren unsur PAD di Bojonegoro menunjukkan peluang peningkatan apabila pengelolaan dilakukan secara profesional dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa analisis laporan keuangan daerah diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan fiskal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang kuat berkat dukungan dana bagi hasil migas, namun tingkat kemandirian fiskal masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD. Dengan strategi yang tepat, struktur pendapatan daerah dapat menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kapasitas fiskal yang relatif kuat, terutama ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil migas. Realisasi pendapatan daerah yang melampaui target pada tahun 2025 menjadi indikator positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, komposisi pendapatan masih memperlihatkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor migas, sehingga tingkat kemandirian fiskal belum sepenuhnya optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas fiskal daerah. Meskipun terdapat tren peningkatan PAD, realisasi pada awal tahun anggaran menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan melalui digitalisasi sistem pemungutan, penguatan pengawasan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal di luar sektor migas.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan memperkuat basis ekonomi daerah agar struktur pendapatan menjadi lebih seimbang, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

Aziz, K. F. (2024). *Tren unsur pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(4). https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12901

Badan Pusat Statistik. (2024). *Financial statistics of provincial government 2023 and 2024*. https://www.bps.go.id/en/publication/2024/12/20/6453851e55f22f31c4d30141/financial-statistics-of-provincial-government-2023-and-2024.html

Badan Pusat Statistik. (2025). *Financial statistics of provincial government 2024 and 2025*. https://www.bps.go.id/en/publication/2025/12/22/71278318c3bf735ad617770d/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2024-dan-2025.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2025). *Kabupaten Bojonegoro dalam angka*. https://bojonegorokab.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2025). *Realisasi penerimaan pemerintah provinsi seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4MCMy/realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan--rincian-2022---rupiah-.html

Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Javasatu.com. (2025). *Pendapatan daerah Bojonegoro 2025 tembus Rp 6,4 triliun, lampaui target 109 persen*. https://javasatu.com/berita/pendapatan-daerah-bojonegoro-2025-tembus-rp-64-triliun-lampaui-target-109-persen/

Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, N., & Pangestoeti, W. (2025). *Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5789

Maesyaroh, A. N., Samanto, H., & Ma'ruf, M. H. (2022). Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali tahun 2017–2020. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(3). https://doi.org/10.53088/jikab.v1i3.26

Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.

Mundiroh, S. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap alokasi belanja modal daerah. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2528

Portal Data APBD – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Data realisasi APBD pemerintah daerah*. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Putri, A. N., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2022). Pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3). https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1901

Radar Bojonegoro. (2025). *Hingga April, realisasi PAD Bojonegoro kurang 62 persen dari target Rp 1 trilium*. https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/715988977/hingga-april-realisasi-pad-bojonegoro-kurang-62-persen-dari-target-rp-1-triliun

Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). Pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro. *JEMeS – Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 6(1). https://doi.org/10.56071/jemes.v6i1.601

Suarabojonegoro.com. (2025). *Pemkab Bojonegoro terima Rp1,94 triliun dari dana bagi hasil migas tahun 2025*. https://suarabojonegoro.com/pemkab-bojonegoro-terima-rp1-94-triliun-dari-dana-bagi-hasil-migas-tahun-2025/

Silviana, H. G. (2025). Determinasi pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Acitya Ardana*, 5(1), 68–81. https://doi.org/10.31092/jaa.v5i1.3325

Siregar, W., Prilia, F. I., Fatimah, F., & Asnidar, A. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1). https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2813